



DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM: ANALISIS SEMANTIK DAN DISKURSIF TERHADAP ISTILAH SYŪRĀ, ‘ADĀLAH, DAN KHILĀFAH DALAM WACANA KEDAULATAN RAKYAT KONTEMPORER

Ummu Fadhilah Imran Ibrahim¹⁾, Muhammad Amri²⁾, Darussalam Syamsuddin³⁾

¹⁾Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

fadhilahimran@unismuh.ac.id

²⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Muhammadamri73@gmail.com

³⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

darussalam.syamsuddin10@gmail.com

Abstract

This research investigates the development and transformation of the meanings of three central concepts in contemporary Islamic political discourse—Syūrā, ‘Adālah, and Khilāfah—which have experienced various forms of semantic change, reinterpretation, and expansion. The core problem addressed lies in the tension and overlap between their classical, normative definitions and the new meanings that have emerged as a consequence of modern socio-political dynamics. This overlap has contributed to the instrumentalization of these terms within political arenas, where they are mobilized to legitimize differing ideological positions. The study seeks to describe the processes through which these shifts in meaning occur, to identify the discursive strategies that generate renewed interpretations, and to analyze the semantic interconnections among the three concepts within the framework of modern Islamic political thought. Adopting a qualitative methodology, the research employs semantic and discourse analysis to examine both classical textual sources and contemporary writings. Data were obtained through an extensive review of Arabic linguistic scholarship, works on Islamic political theory, and modern discursive documents relevant to the topic. The findings indicate that Syūrā has evolved toward a broader and more contemporary notion of political participation; ‘Adālah has moved from being primarily an individual ethical virtue to functioning as a principle of institutional social justice; whereas Khilāfah has become increasingly politicized and fragmented in its interpretations across different ideological currents. Collectively, these three concepts form an interrelated semantic network that plays a crucial role in shaping the architecture of contemporary Islamic political discourse. The study concludes that transformations in meaning are deeply influenced by theological reinterpretations and shifting socio-political demands, thereby demonstrating the significance of semantic analysis as an analytical lens for understanding the evolution of modern Islamic political thought.

Keywords: Semantic Transformation; Islamic Political Discourse; Construction of Modern Meaning.

Abstrak

Penelitian ini menelaah perkembangan dan perubahan makna tiga istilah utama dalam wacana politik Islam kontemporer, yakni Syūrā, ‘Adālah, dan Khilāfah, yang dalam perkembangannya mengalami perluasan, pergeseran, serta rekonstruksi makna. Permasalahan pokok yang dicermati terletak pada adanya irisan dan ketegangan antara pemaknaan klasik yang bersifat normatif dengan pemaknaan modern yang terbentuk melalui dinamika sosial dan politik. Kondisi tersebut menyebabkan ketiga istilah ini kerap dimobilisasi dalam ranah politik guna menopang berbagai klaim ideologis yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan proses terjadinya perubahan makna, mengidentifikasi strategi diskursif yang melahirkan pembacaan baru terhadap ketiga konsep tersebut, serta menganalisis relasi semantik yang terbentuk di antara Syūrā, ‘Adālah, dan Khilāfah dalam konteks politik Islam modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan analisis semantik dan analisis wacana terhadap teks-teks klasik maupun kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam terhadap literatur linguistik Arab, teori politik Islam, serta dokumen-dokumen wacana modern yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Syūrā mengalami perluasan makna menuju konsep partisipasi politik yang lebih modern; ‘Adālah bergeser dari prinsip etika personal menjadi prinsip keadilan sosial yang berorientasi pada institusi; sedangkan Khilāfah mengalami politisasi makna sekaligus fragmentasi dalam ranah penafsirannya. Ketiga konsep tersebut membentuk suatu jaringan semantik yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai fondasi utama dalam konstruksi wacana politik Islam kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan makna dipengaruhi oleh dinamika teologis serta kebutuhan sosial-politik yang terus berkembang, sehingga analisis semantik menjadi instrumen penting dalam memahami evolusi pemikiran politik Islam pada era modern.

Kata kunci: Transformasi Semantik; Wacana Politik Islam; Konstruksi Makna Modern



PENDAHULUAN

Kajian mengenai hubungan antara demokrasi dan politik Islam merupakan salah satu bidang diskursus yang paling dinamis dalam studi keislaman kontemporer, terutama karena sejumlah istilah kunci dalam tradisi Arab-Islam mengalami reinterpretasi seiring perubahan konfigurasi sosial-politik global. Istilah *Syūrā*, *‘Adālah*, dan *Khilāfah* telah lama menempati posisi penting dalam pembentukan pemikiran politik Islam. Namun, dalam konteks modern, ketiga konsep tersebut mengalami perluasan makna sekaligus kontestasi diskursif yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual klasik (Ahmad, 2018). Sejalan dengan menguatnya tuntutan demokratisasi dan partisipasi publik, istilah-istilah ini semakin sering dimanfaatkan dalam wacana politik kontemporer—baik oleh kelompok yang mendukung prinsip demokrasi maupun oleh pihak-pihak yang mengusung model politik Islam yang berbeda.

Dalam kerangka pemikiran modern, *Syūrā* tidak lagi dipahami hanya sebagai mekanisme konsultatif tradisional, tetapi ditafsirkan sebagai prinsip partisipatif yang kerap diposisikan sejajar dengan asas demokrasi. Meski demikian, masih muncul perdebatan mengenai apakah *Syūrā* memiliki sifat mengikat atau sekadar bersifat nasihat, serta bagaimana relasinya dengan konsep kedaulatan rakyat (Fadhil, 2021). Pada saat yang sama, istilah *‘Adālah* berkembang menjadi poros nilai dalam berbagai gagasan pemerintahan Islam modern. Dalam wacana kontemporer, *‘Adālah* dimaknai sebagai keadilan sosial, distribusi hak yang setara, transparansi kekuasaan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas—suatu perluasan makna yang melampaui pengertian dalam *fiqh* klasik (Syamsuddin, 2020). Melalui kerangka ini, *‘Adālah* banyak dijadikan landasan bagi gagasan negara hukum modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam.

Adapun *Khilāfah*, sebagai istilah yang sarat muatan historis, telah mengalami transformasi makna dalam diskursus politik masa kini. Sebagian kalangan memaknainya sebagai simbol persatuan umat dan kepemimpinan moral, sementara sebagian lainnya menilai bahwa *Khilāfah* pada era modern lebih tepat dipahami sebagai nilai normatif ketimbang sebagai institusi politik tunggal sebagaimana pada masa klasik (Karim, 2017). Pergeseran semantik tersebut memperlihatkan bahwa *Khilāfah* tidak semata-mata merupakan konsep teologis, melainkan juga konstruksi ideologis yang terus dinegosiasikan dalam ruang wacana publik.

Dengan demikian, analisis terhadap *Syūrā*, *‘Adālah*, dan *Khilāfah* menuntut pendekatan semantik yang dipadukan dengan analisis wacana. Makna istilah dalam bahasa Arab bersifat dinamis dan senantiasa bergerak mengikuti konteks pemakaian, aktor yang mengartikulusikannya, serta orientasi politik yang ingin dicapai. Pendekatan semantik memungkinkan peneliti menelusuri pergeseran makna leksikal maupun kontekstual dari periode klasik hingga modern, sementara analisis wacana memberi ruang untuk memahami bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen legitimasi maupun delegitimasi politik (Naufal, 2019). Atas dasar itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana ketiga konsep

tersebut diproduksi, dinegosiasikan, dan dirumuskan ulang dalam perdebatan mengenai kedaulatan rakyat.

Dalam relasi antara kelompok tradisional dan skripturalis, persoalan otoritas keagamaan kerap menjadi semakin kompleks ketika kedua belah pihak menggunakan istilah yang sama tetapi memberikan interpretasi makna yang berbeda. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian semantik dan diskursif untuk memahami sumber konflik penafsiran sekaligus melihat bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi epistemologis (Rahim, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi bagi studi politik Islam, tetapi juga memperkaya khazanah linguistik Arab dalam konteks kontemporer.

Melalui kajian ini, penulis berupaya menghadirkan dasar argumentasi ilmiah bahwa demokrasi, pada batas-batas tertentu, dapat memiliki titik temu yang konstruktif dengan nilai-nilai politik Islam, selama dilakukan reinterpretasi semantik yang proporsional dan analisis wacana yang bersifat objektif. Dengan pemaparan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman terhadap dinamika istilah politik Islam sekaligus menjadi rujukan dalam diskursus kedaulatan rakyat pada era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan analisis pada dimensi semantik dan wacana terhadap tiga istilah utama dalam politik Islam, yaitu *Syūrā*, *‘Adālah*, dan *Khilāfah*. Pendekatan tersebut dipilih untuk menelusuri perubahan makna, pergeseran dalam penggunaan, serta konstruksi wacana yang melekat pada ketiga konsep tersebut dalam perdebatan mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat pada masa kontemporer. Dalam kerangka penelitian ini, bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh konteks ideologis, historis, dan sosial-politik, sehingga analisis tidak hanya difokuskan pada teks, tetapi juga pada konteks wacana yang mengiringinya.

Data penelitian mencakup sumber tekstual dan wacana yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri atas kitab tafsir modern, karya-karya politik Islam kontemporer, dokumen resmi organisasi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta wacana publik yang beredar melalui media massa dan forum akademik. Sumber sekunder meliputi kajian linguistik Arab, literatur semantik modern, dan teori analisis wacana kritis. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dan kedalaman analisis terhadap isu demokrasi dan otoritas keagamaan dalam konteks kekinian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan cara mengelompokkan teks-teks yang memuat istilah *Syūrā*, *‘Adālah*, dan *Khilāfah* ke dalam tiga kategori: teks normatif (*Al-Qur’an*, hadis, dan tafsir), teks konseptual-akademik (buku dan artikel ilmiah), serta teks praksis-wacana (pidato, artikel opini, dan pernyataan organisasi keagamaan). Teknik ini sejalan dengan karakteristik penelitian linguistik yang menuntut ketelitian dalam penelusuran bentuk dan makna istilah.



Analisis data dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama berupa analisis semantik yang bertujuan mengidentifikasi makna dasar, makna konotatif, relasi semantik antarkonsep, dan pergeseran makna dari periode klasik hingga modern. Tahap kedua menggunakan analisis wacana kritis untuk mengungkap bagaimana istilah-istilah tersebut diproduksi, direinterpretasi, dan dipolitikasi oleh berbagai aktor, seperti intelektual Muslim, organisasi Islam, dan kelompok keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan bahasa sebagai sarana legitimasi teologis maupun ideologis dalam wacana kedaulatan rakyat.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam melakukan interpretasi kritis terhadap teks. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari beragam dokumen dan pandangan para ahli. Melalui rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi makna dan dinamika wacana terkait istilah *Syūrā*, *‘Adālah*, dan *Khilāfah* dalam diskursus demokrasi kontemporer, sekaligus menunjukkan bagaimana bahasa Arab berfungsi sebagai arena kontestasi politik dan ideologis dalam ruang publik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Semantik Istilah *Syūrā* dalam Wacana Demokrasi Kontemporer

Analisis semantik menunjukkan bahwa istilah *syūrā* berasal dari akar kata *sh-w-r* yang pada dasarnya bermakna “memberi pendapat” serta “menyatakan sesuatu yang semula tersembunyi,” yakni gagasan yang lahir melalui proses musyawarah (Fauzān ‘Abd al-Rahmān, 2017). Dalam khazanah klasik, makna tersebut diposisikan sebagai *ma’nā aṣlī* (makna dasar). Namun, seiring dinamika sosial-politik modern, terjadi proses *al-tawassu’ al-dalālī* (perluasan makna), sehingga *syūrā* tidak lagi dipahami sekadar sebagai forum konsultasi para elit, melainkan bergeser menuju prinsip partisipasi publik yang lebih luas.

Temuan al-Ghāmīdī (2018) memperlihatkan bahwa *syūrā* mengalami pergeseran medan makna (*semantic field shift*) selaras dengan perubahan konfigurasi otoritas politik dalam masyarakat Muslim. Dalam kerangka analisis semantik kontemporer, *syūrā* kini dipahami sebagai konsep yang mengalami perubahan konteks makna (*naql al-dalālah al-siyāqī*), di mana istilah yang semula bersifat religius mengalami resemantisasi di ruang politik modern yang menekankan dimensi partisipatif, prosedural, dan akuntabilitas (‘Abduh al-Rājīhī, 2020).

Perubahan makna tersebut semakin tampak dalam praktik kelembagaan Islam kontemporer, ketika istilah *syūrā* dijadikan landasan pengelolaan administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan publik. Transformasi ini menunjukkan bahwa *syūrā* tidak lagi dipahami semata sebagai musyawarah bernuansa moral dan spiritual, tetapi juga sebagai prinsip transparansi pemerintahan dalam sistem modern.

Fenomena ini memperoleh penguatan melalui rujukan semantik dalam konteks Indonesia. Abdul Chaer (2014) menegaskan bahwa perubahan makna dapat dipicu oleh faktor sosial, budaya, dan ideologi, sehingga istilah keagamaan mengalami pergeseran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan *syūrā* dalam kerangka demokrasi dapat dipandang sebagai proses linguistik yang alamiah, lahir dari perjumpaan tradisi Islam dengan dinamika politik modern yang memunculkan baik penyempitan maupun perluasan makna.

Dari sudut pandang wacana, al-‘Ulayyān (2022) menilai bahwa *syūrā* tidak lagi berfungsi hanya sebagai konsep normatif, melainkan telah beralih menjadi instrumen retorik yang digunakan untuk menegaskan keselarasan antara Islam dan demokrasi. Dalam konteks ini, *syūrā* bertransformasi menjadi simbol legitimasi politik yang dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk memperkuat posisi argumentatif mereka di ruang publik.

Lebih jauh, dalam perkembangan politik mutakhir, *syūrā* kerap dikaitkan dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menekankan diskusi terbuka serta partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, *syūrā* kini tidak lagi semata-mata dipahami sebagai konsep tradisional, tetapi telah menjadi bagian integral dari praktik politik yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial dalam kerangka demokrasi modern.

Transformasi ini turut dipengaruhi oleh arus global yang mendorong negara-negara mayoritas Muslim untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan mereka dengan prinsip demokrasi internasional, seperti transparansi dan partisipasi. Akibatnya, *syūrā* diintegrasikan ke dalam berbagai sistem pemerintahan kontemporer, baik sebagai lembaga konsultatif maupun sebagai mekanisme peningkatan akuntabilitas. Dengan demikian, perubahan tersebut menunjukkan bahwa istilah *syūrā* tidak hanya bertahan dalam wacana tradisional, tetapi terus berkembang dan beradaptasi menjawab tuntutan zaman serta kebutuhan politik masa kini.

Adālah sebagai Kerangka Etis dan Keadilan Sosial: Analisis Semantik dan Politik

Dalam perspektif semantik, akar kata *-d-l* memuat makna dasar “lurus,” “seimbang,” dan “adil,” yang kemudian berkembang menjadi pengertian turunan yakni “menempatkan sesuatu secara proporsional pada tempatnya” (Al-Rāghib al-Aṣṣḥānī, 2016). Dalam kajian semantik Arab, *‘adālah* diklasifikasikan sebagai *ṣifah al-qiyam* (sifat bernilai), yaitu makna abstrak yang berkaitan langsung dengan kualitas moral (‘Abduh al-Rājīhī, 2020). Karakter nilai tersebut menjadikan *‘adālah* sebagai konsep yang bersifat elastis dan memungkinkan terjadinya perluasan makna sesuai dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketika *‘adālah* memasuki wacana politik modern, istilah ini mengalami penataan ulang makna (*semantic reconfiguration*). Jika pada awalnya *‘adālah* diposisikan dalam ranah etika personal, maka dalam perkembangan berikutnya ia berubah menjadi prinsip struktural yang



mencakup keadilan hukum, pemerataan akses sumber daya, dan distribusi kekuasaan. Pergeseran tersebut menandai transformasi konsep keagamaan menjadi instrumen normatif dalam tata kelola pemerintahan modern.

al-Sa'īd (2021) mencatat terjadinya naql dalālī mu'assasī (perpindahan makna secara kelembagaan), yakni pergeseran 'adālah dari domain fikih menuju ranah kebijakan negara sehingga ia berfungsi sebagai landasan normatif dalam perumusan kebijakan publik. Fenomena ini tampak, misalnya, dalam konteks Indonesia, di mana gagasan keadilan sosial mengintegrasikan nilai-nilai etis Islam ke dalam prinsip dasar kenegaraan yang tercermin dalam Pancasila.

Dalam kajian linguistik Indonesia, Kridalaksana (2018) menjelaskan bahwa perubahan makna terjadi ketika suatu istilah memasuki domain konseptual baru dengan fungsi yang berbeda. Kerangka ini membantu memahami alasan mengapa istilah 'adālah diterjemahkan sebagai keadilan sosial dalam konteks modern tanpa menanggalkan akar semantik klasiknya.

Lebih jauh, penelitian Hasan (2019) menunjukkan bahwa 'adālah kini dipahami sebagai konsep yang menghubungkan etika Islam dengan prinsip demokrasi, terutama terkait isu kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. Dengan demikian, istilah keagamaan berfungsi sebagai jembatan semantik antara tradisi keilmuan Islam dan teori negara hukum modern.

Konsep 'adālah yang mengalami pengayaan makna tersebut juga memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan. Pada tataran global, nilai keadilan sosial yang berakar pada prinsip 'adālah banyak dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan inklusif di berbagai sektor—termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan distribusi yang setara, melainkan juga pemenuhan hak individu sesuai kondisi dan kebutuhan mereka.

Sebagai prinsip yang semakin melekat dalam praktik pemerintahan modern, 'adālah menunjukkan relevansi yang kuat dalam merespons isu-isu kontemporer seperti pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial. Dalam kerangka tersebut, 'adālah tidak lagi dipahami hanya sebagai ajaran moral normatif, tetapi juga sebagai panduan operasional dalam membangun masyarakat yang adil, merata, dan adaptif terhadap tuntutan perubahan sistem politik pada era modern.

Pergeseran Semantik dan Diskursif Konsep Khilāfah dalam Konteks Kedaulatan Rakyat

Secara etimologis, istilah khilāfah berasal dari akar kata kh-l-f yang bermakna “pengganti” atau “perwakilan” (Al-Rāghib al-Aṣḥānī, 2016). Pada tataran semantik klasik, konsep ini merujuk pada institusi politik pasca wafatnya Nabi, namun perubahan sosial-historis yang terjadi kemudian menyebabkan maknanya terfragmentasi sekaligus meluas. Dalam kajian linguistik kontemporer, khilāfah dipandang mengalami tasyyīs al-dalālah (politisasi makna), yakni proses penambahan muatan ideologis

terhadap arti leksikal yang semula bersifat tradisional (Yāsir al-Khamīs, 2020).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Chaer (2014) yang menegaskan bahwa pergeseran makna kerap didorong oleh kepentingan ideologis dan termasuk dalam kategori penyempitan semantis, ketika suatu istilah diarahkan untuk mengabdikan pada tujuan politik tertentu. Dalam arus kebangkitan Islam kontemporer, khilāfah kerap dimobilisasi sebagai simbol identitas politik yang digunakan untuk menantang ataupun mengkritisi legitimasi negara-bangsa modern.

Temuan Firdaus (2021) menunjukkan bahwa istilah khilāfah berfungsi sebagai perangkat retorik bagi kelompok revivalis untuk membangun narasi tandingan atas legitimasi politik kontemporer. Selaras dengan itu, al-Harīrī (2023) menjelaskan bahwa khilāfah mengalami proses i'ādat intāj al-dalālah (rekonstruksi makna), yakni usaha sebagian kelompok merumuskan kembali arti khilāfah guna mempertahankan otoritas nilai keagamaan di tengah tantangan modernisasi.

Dari sudut pandang progresif, khilāfah tidak lagi dipersepsikan sebagai bentuk negara tertentu, melainkan sebagai prinsip kepemimpinan yang menekankan amanah, kejujuran, akuntabilitas, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pembacaan semantik semacam ini memperlihatkan bahwa perdebatan terkait khilāfah pada hakikatnya merupakan perdebatan tentang siapa yang berhak mendefinisikan makna, bukan semata perbedaan doktrin teologis.

Dengan menguatnya wacana demokrasi dan kedaulatan rakyat, konsep khilāfah mengalami perluasan menjadi simbol yang lebih lentur dalam diskursus politik mutakhir. Dalam banyak pembahasan modern, khilāfah tidak lagi dipahami terbatas pada model pemerintahan teokratis, tetapi juga sebagai seperangkat nilai kepemimpinan yang dapat diimplementasikan dalam beragam sistem politik. Arah perkembangan ini menonjolkan pentingnya moralitas dan etika publik, dengan orientasi utama pada kesejahteraan warga serta transparansi proses pengambilan keputusan.

Transformasi makna tersebut tampak jelas dalam relasi khilāfah dengan gagasan kedaulatan rakyat. Dengan penekanan pada kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab, khilāfah menawarkan kerangka yang memadukan nilai keadilan sosial Islam dengan tuntutan demokrasi kontemporer. Dalam pengertian ini, khilāfah berperan sebagai jembatan antara tradisi keagamaan dan praktik politik modern, sehingga tetap relevan untuk merespons dinamika politik dan sosial yang terus berubah. Dengan demikian, khilāfah tetap hadir sebagai bagian penting dalam perdebatan mengenai model negara ideal di tengah arus globalisasi dan pluralisme politik saat ini.

Relasi Semantik antara Syūrā, 'Adālah, dan Khilāfah dalam Demokrasi Modern

Ketiga istilah tersebut membentuk suatu medan makna politik Islam (*al-maydān al-dalālī*) yang saling berhubungan, baik dari sisi semantik maupun fungsi



ideologisnya. Dalam kerangka analisis semantik Arab, keterkaitan antar-konsep yang saling memperkuat ini dipahami sebagai al-shabakah al-dalāliyah (jaringan semantik) (Kamāl Abū Zayd, 2020). Syūrā merepresentasikan dimensi partisipasi, 'adālah menekankan prinsip keadilan etis, sedangkan khilāfah memuat legitimasi moral kepemimpinan. Secara keseluruhan, ketiganya membentuk basis nilai yang menopang prinsip-prinsip utama dalam politik Islam.

Dalam ranah politik kontemporer, ketiga konsep tersebut bertransformasi menjadi struktur konseptual terpadu yang dapat diselaraskan dengan gagasan kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa terminologi politik Islam bersifat lentur dan dinamis, memungkinkan terjadinya proses adaptasi sejalan dengan perubahan kebutuhan sosial dan politik modern. Dengan demikian, perkembangan ini mencerminkan evolusi pemikiran politik Islam yang berusaha menjawab tantangan zaman tanpa melepaskan fondasi normatifnya.

Abū Zayd (2020) menegaskan bahwa relasi semantik antara syūrā, 'adālah, dan khilāfah berakar pada seperangkat nilai dasar bersama, seperti amanah, keadilan, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut tidak hanya membentuk identitas makna masing-masing istilah, tetapi juga mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka konseptual yang kohesif. Sejalan dengan pandangan Kridalaksana (2017), istilah yang berada dalam satu medan makna akan membentuk hubungan paradigmatis yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pada konteks kekinian, ketiga istilah ini berfungsi sebagai pilar konseptual politik Islam yang dapat ditafsirkan ulang untuk menghadapi tuntutan modernitas, seraya tetap mempertahankan akar semantik klasiknya. Oleh sebab itu, perbedaan tafsir yang muncul lebih mencerminkan kompetisi terhadap otoritas makna, bukan semata-mata perbedaan teologis yang bersifat fundamental.

Lebih jauh, ketiga konsep ini juga memperlihatkan dinamika politik Islam dalam merespons agenda demokratisasi. Syūrā, melalui penekanan pada partisipasi publik, menjadi basis inklusivitas dalam pemerintahan; 'adālah berfungsi sebagai orientasi normatif bagi keadilan sosial dan distribusi hak; sementara khilāfah, yang sebelumnya diikat pada bentuk institusi tertentu, kini berkembang sebagai simbol otoritas moral yang berlandaskan etika kepemimpinan Islam. Secara bersama-sama, ketiganya merumuskan visi politik Islam yang adaptif terhadap transformasi zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai universal agama.

Di samping itu, ketiga istilah tersebut memainkan peran strategis dalam memperkuat legitimasi politik di negara-negara mayoritas Muslim yang tengah berupaya mengharmonikan tradisi keagamaan dengan tuntutan demokrasi modern. Dalam konteks ini, syūrā, 'adālah, dan khilāfah tidak hanya berfungsi sebagai kategori teologis, melainkan juga sebagai instrumen konseptual untuk merespons persoalan sosial-politik dan membangun sistem pemerintahan yang lebih adil serta partisipatif. Dengan demikian, ketiga konsep ini memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan sintesis antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan demokratisasi di era kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian semantik atas istilah Syūrā, 'Adālah, dan Khilāfah dalam wacana politik Islam mutakhir memperlihatkan bahwa ketiga konsep tersebut telah mengalami perubahan makna yang cukup mendasar seiring dengan dinamika sosial, politik, dan intelektual di dunia Islam. Pertama, istilah Syūrā, yang pada mulanya dipahami sebatas forum musyawarah kalangan elite dalam tradisi klasik, kini mengalami perluasan makna (semantic expansion) menuju pemaknaan baru sebagai prinsip partisipasi politik yang lebih terbuka dan inklusif, serta memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai demokrasi modern. Pergeseran ini berlangsung melalui proses pemindahan makna secara kontekstual (contextual semantic transfer), yaitu peralihan dari ranah keagamaan menuju ruang publik dan institusional.

Kedua, istilah 'Adālah memperlihatkan terjadinya rekonfigurasi makna (semantic reconfiguration) yang lebih mendalam, di mana orientasinya bergeser dari etika individual menuju prinsip keadilan sosial yang berakar pada struktur negara modern. Dalam posisi tersebut, 'Adālah berfungsi sebagai penghubung antara nilai moral Islam dan prinsip negara hukum demokratis, serta kerap dimanfaatkan dalam wacana politik oleh berbagai kelompok untuk meneguhkan legitimasi etis maupun politik dalam praktik kehidupan bernegara.

Ketiga, istilah Khilāfah menunjukkan perubahan makna yang paling dinamis akibat proses politisasi semantik. Maknanya terfragmentasi ke dalam beragam bentuk, mulai dari simbol spiritual, model ideal tata pemerintahan, hingga proyek ideologis kontemporer. Dalam konteks modern, khilāfah mengalami reproduksi makna untuk menopang agenda politik tertentu, baik dalam wacana gerakan revivalis maupun dalam perspektif progresif yang mencoba menafsirkan ulang fungsi konseptualnya.

Secara relasional, ketiga istilah tersebut membentuk jaringan medan makna (semantic network) yang saling berkelindan dalam konstruksi politik Islam modern. Syūrā menonjolkan prinsip deliberasi dan partisipasi publik, 'Adālah menegaskan keadilan dan etika sosial, sementara Khilāfah memberi landasan legitimasi dan moralitas kepemimpinan. Perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok Islam kontemporer tidak hanya mencerminkan perbedaan teologis, tetapi juga menunjukkan adanya kontestasi dalam produksi makna, ketika masing-masing aktor berupaya mendefinisikan ulang istilah tersebut sesuai dengan horizon ideologis mereka.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap politik Islam modern tidak dapat dilepaskan dari analisis semantik dan wacana. Pergeseran makna pada istilah-istilah kunci seperti Syūrā, 'Adālah, dan Khilāfah menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan senantiasa bergerak mengikuti perkembangan pemikiran, konfigurasi kekuasaan, serta tuntutan historis masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA



- Abd al-Rahmān, Fauzān. (2017). *‘Ilm al-Dalālah*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Abū Zayd, Kamāl. (2020). *al-Shabakah al-Dalāliyah li al-Muṣṭalahāt al-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah*. Doha: Markaz al-Dirāsāt al-Lughawiyyah.
- Ahmad, M. (2018). *Rekonstruksi Makna Politik dalam Bahasa Arab*. Jakarta: Nusa Media.
- al-‘Ulayyān, Muḥammad. (2022). *Istrāṭījiyyāt al-Ta’wīl fī al-Khiṭāb al-Siyāsī al-Islāmī*. Majallat al-Lughah wa al-Ma’nā.
- al-Aṣfahānī, Al-Rāghib. (2016). *Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalam.
- al-Ghāmīdī, Sa’d. (2018). *Tatawwur al-Dalālah fī al-Muṣṭalah al-Siyāsī al-Islāmī*. Riyāḍ: Markaz al-Baḥth al-Lughawī.
- al-Ḥarīrī, Rāshid. (2023). *I’ādat Intāj al-Dalālah fī al-Khiṭāb al-Islāmī al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-Lughawiyyah.
- al-Khamīs, Yāsir. (2020). *Tasyyīs al-Dalālah fī al-Muṣṭalah al-Dīnī*. Majallat al-Dalālah al-‘Arabīyyah.
- al-Rājīhī, ‘Abduh. (2020). *‘Ilm al-Dalālah*. Kairo: Dār al-Ma’rifah.
- al-Sa’īd, Hānī. (2021). *Naql al-Dalālah fī al-Muṣṭalahāt al-Siyāsiyyah*. Kairo: Dār al-‘Ilm.
- Chaer, Abdul. (2014). *Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadhil, R. (2021). *Syūrā dan Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam Modern*. Bandung: Al-Fikr Press.
- Firdaus, Ahmad. (2021). *Diskursus Khilafah*. Islamic Discourse Review.
- Hasan. (2019). *Islam, Keadilan Sosial, dan Negara Demokratis*. Jakarta: UIN Press.
- Karim, S. (2017). *Diskursus Khilāfah di Era Global*. Surabaya: Alfabeta Research.
- Kridalaksana, Harimurti. (2017). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. (2018). *Perubahan Makna Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Naufal, H. (2019). *Analisis Wacana Politik Islam Kontemporer*. Malang: Lingua Academia.
- Rahim, A. (2022). *Ideologi dan Bahasa dalam Politik Islam*. Makassar: Pustaka Timur.
- Syamsuddin, L. (2022). *‘Adālah sebagai Prinsip Etis Negara Modern*. Yogyakarta: UMY Press.